

**BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PENDUDUK
SEBAGAI DETERMINAN PDRB KABUPATEN/KOTA DI BALI*****Regional Expenditure, Local Own-Source Revenue, And Population Dynamics
As Determinants Of Grdp Across Regencies And Municipalities In Bali*****I Made Putra Yasa^{*1}, Ni Made Adi Erawati², I Wayan Priyana Agus
Sudharma³**^{1,2,3}**Universitas Udayana, Indonesia*****Email: putrayasa@unud.ac.id****Abstract**

This study examines the effects of regional expenditure, locally generated revenue (PAD), population, and the COVID-19 period on gross regional domestic product (GRDP) in the nine regencies and city of Bali Province during 2016-2024. A balanced panel of 81 observations was estimated using a cross-section fixed-effect model. The results show that regional expenditure and population have positive and statistically significant associations with GRDP. PAD has a negative but insignificant coefficient, while the COVID-19 dummy is also negative and insignificant after regional heterogeneity is controlled. The findings indicate that fiscal expansion contributes to regional output when it is supported by implementation quality, productive allocation, and policies responsive to each region's demographic and economic structure.

Keywords: GRDP, regional expenditure, locally generated revenue, population, covid-19

Abstrak

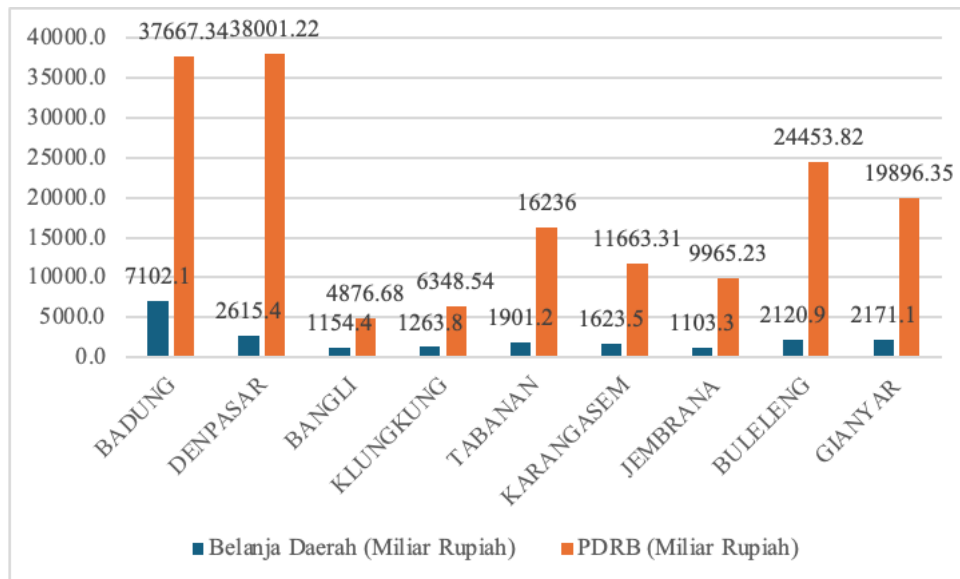
Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk, dan periode COVID-19 terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali selama 2016-2024. Data panel seimbang sebanyak 81 observasi diestimasi menggunakan model efek tetap antardaerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah dan jumlah penduduk berhubungan positif dan signifikan dengan PDRB. PAD memiliki koefisien negatif tetapi tidak signifikan, sedangkan dummy COVID-19 juga negatif dan tidak signifikan setelah heterogenitas daerah dikendalikan. Temuan ini menunjukkan bahwa ekspansi fiskal lebih bermanfaat bagi output daerah apabila ditopang kualitas pelaksanaan, alokasi produktif, dan kebijakan yang sesuai dengan struktur demografi serta ekonomi masing-masing wilayah.

Kata Kunci: PDRB, belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah, jumlah penduduk, covid-19

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal memberi pemerintah daerah ruang untuk menentukan prioritas pendapatan dan belanja sesuai kebutuhan masyarakat. Ruang tersebut penting karena pengaruh kebijakan fiskal tidak berhenti pada besarnya anggaran. Dampaknya terhadap kegiatan ekonomi juga ditentukan oleh komposisi belanja, kesiapan program, kualitas pelaksanaan, dan kemampuan daerah menerjemahkan penerimaan menjadi layanan publik serta infrastruktur produktif. Literatur internasional memperlihatkan hasil yang beragam. Belanja publik dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ketika mendukung modal publik dan layanan yang produktif (Aschauer, 1989; Barro, 1990; Bose et al., 2007), tetapi

dampaknya dapat melemah apabila komposisi belanja tidak tepat atau institusi pelaksana tidak memadai (Devarajan et al., 1996; Ghosh & Gregoriou, 2008).



Gambar 1. Realisasi Belanja Daerah dan PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

Gambar 1. menunjukkan bahwa Denpasar dan Badung memiliki PDRB tertinggi, tetapi belanja daerah paling besar terdapat di Badung. Buleleng dan Gianyar juga mencatat PDRB relatif tinggi, sedangkan Bangli, Klungkung, dan Jembrana berada pada kelompok yang lebih rendah. Provinsi Bali menyediakan konteks yang khas untuk menguji hubungan tersebut. Sembilan kabupaten/kota memiliki struktur ekonomi, kepadatan penduduk, kapasitas fiskal, dan ketergantungan pada pariwisata yang tidak sama. Badung dan Denpasar memiliki basis jasa serta penerimaan daerah yang relatif kuat, sedangkan wilayah lain lebih bergantung pada pertanian, perdagangan lokal, atau transfer. Pandemi mempertegas perbedaan itu karena kontraksi paling dalam terjadi di daerah yang bergantung pada mobilitas dan kunjungan wisatawan. Sanjaya et al. (2024) menilai pemulihan Bali memerlukan diversifikasi, penguatan hubungan antarsektor, dan transformasi ekonomi yang lebih tangguh.

Belanja daerah secara teoritis mendorong PDRB melalui permintaan agregat, pengadaan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan. PAD mencerminkan kapasitas ekonomi sekaligus kemandirian fiskal, tetapi peningkatan PAD belum tentu langsung menaikkan output apabila penerimaannya berasal dari penyesuaian tarif, terkonsentrasi pada sektor tertentu, atau tidak diikuti belanja produktif. Jumlah penduduk memperbesar tenaga kerja dan pasar, sekaligus meningkatkan kebutuhan pelayanan. Sementara itu, pandemi berpotensi menekan output melalui pembatasan mobilitas dan turunnya aktivitas usaha.

Penelitian ini menempatkan PDRB sebagai keluaran ekonomi serta menguji belanja daerah, PAD, jumlah penduduk, dan periode COVID-19 secara bersama-sama. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh keempat variabel tersebut

terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan mengendalikan karakteristik tetap setiap daerah.

METODE

Penelitian dilakukan pada delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali dengan periode pengamatan 2016-2024 yang menghasilkan 81 observasi. Variabel dependen adalah PDRB kabupaten/kota (Y). Variabel independen mencakup realisasi belanja daerah (X1), realisasi PAD (X2), jumlah penduduk (X3), dan dummy COVID-19 (X4). Model empiris dirumuskan sebagai berikut.

$$LPDRB_{it} = \alpha + \beta_1 LBD_{it} + \beta_2 LPAD_{it} + \beta_3 LPDDK_{it} + \beta_4 COV_{it} + e_{it}$$

Pemilihan model dilakukan melalui perbandingan *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Uji Chow menghasilkan probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square sebesar 0,0000, sehingga *common effect* ditolak. *Fixed Effect* digunakan berdasarkan hasil Uji Chow dan bahwa karakteristik daerah yang relatif tetap, seperti basis ekonomi, intensitas pariwisata, lokasi, kapasitas fiskal, serta kualitas kelembagaan, berpotensi berkorelasi dengan belanja, PAD, dan jumlah penduduk. Dengan demikian, estimasi difokuskan pada perubahan variabel di dalam daerah dari waktu ke waktu setelah perbedaan tetap antardaerah dikendalikan.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi operasional	Sumber
PDRB (LPDRB)	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diukur menggunakan PDRB atas dasar harga konstan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali (Miliar Rupiah)	BPS
Belanja daerah (LBD)	Realisasi total belanja pemerintah daerah pada tahun berjalan. (Miliar Rupiah)	DJPB
PAD (LPAD)	Nilai realisasi PAD yang diperoleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota (Miliar Rupiah)	BPS
Jumlah penduduk (LPDDK)	Jumlah penduduk kabupaten/kota. (Ribuan jiwa)	BPS
COVID-19 (COV)	Dummy periode pandemi (2020,2021,2022)	Diolah

Sumber: data diolah, 2026

Seluruh variabel tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (ln) untuk mengurangi perbedaan skala antardata, membantu menstabilkan varians, dan memudahkan interpretasi koefisien regresi sebagai elastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pemilihan model menunjukkan bahwa Probabilitas Uji Chow sebesar 0,000 menandakan adanya perbedaan efek individual yang kuat di antara kabupaten/kota. Hasil ini konsisten dengan kondisi Bali, karena kegiatan ekonomi dan kemampuan fiskal antardaerah tidak hanya berbeda pada satu tahun tertentu, tetapi dibentuk oleh karakteristik yang bertahan relatif lama. *Fixed Effect Model*

mengendalikan perbedaan tersebut sehingga koefisien dibaca sebagai hubungan antara perubahan variabel penjelas dan perubahan PDRB di dalam daerah yang sama.

Tabel 2. Hasil Pemilihan Model Data Panel

Pengujian	Statistik	Probabilitas	Interpretasi
Uji Chow: cross-section F	101,348045	0,0000	Common effect ditolak.
Uji Chow: cross-section chi-square	207,281579	0,0000	Fixed effect lebih sesuai daripada common effect.

Sumber: data diolah, 2026

Persamaan *Fixed Effect Model* yang diperoleh adalah

$$LPDRB = 10.280,10 + 2,648 LBD - 0,353 LPAD + 4,682 LPDDK - 136,099 COV + e$$

Secara simultan, model signifikan dengan F-statistic sebesar 780,26 dan probabilitas 0,000. Nilai *R-squared* sebesar 0,992 dan *adjusted R-squared* sebesar 0,991 menunjukkan bahwa variabel penjelas bersama efek tetap daerah menerangkan sebagian besar variasi PDRB dalam sampel.

Tabel 3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Dependent Variable: LPDRB

Method: Panel Least Squares

Sample: 2016 2024

Periods included: 9

Cross-sections included: 9

Total panel (balanced) observations: 81

Variable	Coefficient			
	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	10280.10	1383.148	7.432392	0.0000
LBD	2.648174	0.575586	4.600834	0.0000
-				
LPAD	0.353070	0.408174	-0.864999	0.3901
LPDDK	4.682301	2.312719	2.024587	0.0468
-				
COV	136.0995	242.6621	-0.560860	0.5767

Effects
Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

	Mean dependent	16955.5
R-squared	0.992790var	5
Adjusted R-squared		10622.7
	S.D. dependent var	4
	Akaike info	16.7556
S.E. of regression	978.3585criterion	8

Sum squared	6508860		17.1399
resid	4	Schwarz criterion	7
	-	Hannan-Quinn	16.9098
Log likelihood	665.6049	criter.	6
		Durbin-Watson	1.09424
F-statistic	780.2665	stat	4
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: data diolah, 2026

Pengaruh belanja daerah terhadap PDRB

Koefisien variabel belanja daerah sebesar 2,648 dan memiliki probabilitas 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realisasi belanja daerah sebesar 1 persen akan meningkatkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar sekitar 2,648 persen. Hubungan positif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan belanja di dalam suatu kabupaten/kota berkaitan dengan peningkatan PDRB. Secara ekonomi, belanja pemerintah memasuki kegiatan produksi melalui pembangunan infrastruktur, pembayaran barang dan jasa, belanja pegawai, transfer kepada masyarakat, serta penyediaan pendidikan dan kesehatan. Saluran ini dapat memperbesar permintaan jangka pendek sekaligus kapasitas produksi apabila pengeluaran diarahkan pada kegiatan yang mempunyai hubungan kuat dengan sektor ekonomi lokal.

Temuan ini sejalan dengan gagasan bahwa modal publik dan layanan pemerintah dapat meningkatkan produktivitas sektor swasta (Aschauer, 1989; Barro, 1990). Easterly dan Rebelo (1993) juga menunjukkan pentingnya investasi transportasi dan komunikasi, sedangkan Bose et al. (2007) menemukan bahwa beberapa jenis belanja publik memberi manfaat pertumbuhan yang berbeda pada negara berkembang. Dalam konteks desentralisasi, belanja lokal memungkinkan program disesuaikan dengan kebutuhan wilayah, tetapi efektivitasnya bergantung pada komposisi dan tata kelola. Devarajan et al. (1996), Kneller et al. (1999), serta Ghosh dan Gregoriou (2008) mengingatkan bahwa label belanja produktif tidak otomatis menjamin hasil apabila alokasi tidak menjawab kelangkaan utama daerah.

Karena variabel yang digunakan adalah total belanja daerah, koefisien positif tidak dapat diartikan bahwa seluruh tambahan anggaran sama efektifnya. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas fiskal daerah berhubungan dengan skala output. Setyari et al. (2026) menunjukkan bahwa ketepatan pelaksanaan anggaran memengaruhi manfaat ekonomi dan risiko kehilangan manfaat. Implikasinya, pemerintah daerah Bali perlu menghubungkan tambahan pagu dengan kesiapan dokumen, jadwal pengadaan, kapasitas pelaksana, dan indikator keluaran. Belanja yang menumpuk pada akhir tahun dapat menaikkan realisasi nominal tanpa memberikan efek produksi yang optimal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB

Koefisien PAD sebesar -0,353 dengan nilai probabilitas 0,390. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PAD sebesar 1 persen berkaitan dengan penurunan PDRB atas dasar harga konstan sebesar sekitar 0,353 persen. Arah negatif tidak signifikan, sehingga penelitian ini tidak memperoleh bukti bahwa perubahan PAD secara langsung meningkatkan atau menurunkan PDRB. Hasil

tersebut tidak berarti PAD tidak penting. PAD tetap menentukan fleksibilitas anggaran dan kemandirian daerah.

Di Provinsi Bali, PAD sangat dipengaruhi pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan transaksi properti. Penerimaan tersebut cenderung meningkat setelah aktivitas ekonomi tumbuh, sehingga hubungan PAD dan PDRB dapat berjalan dua arah. Pada saat yang sama, upaya menaikkan penerimaan melalui tarif atau intensifikasi yang kurang terukur dapat menambah biaya kegiatan usaha. Gadenne (2017) menekankan bahwa sumber penerimaan lokal dapat memperkuat akuntabilitas apabila diikuti penggunaan yang terlihat dan bermanfaat. Sebaliknya, besarnya sumber fiskal tidak menjamin kualitas kebijakan; Brollo et al. (2013) menunjukkan bahwa tambahan sumber daya dapat berinteraksi dengan insentif politik dan kapasitas institusi.

Temuan ini melengkapi Ananta dan Erawati (2025) PAD mungkin lebih cepat memengaruhi keputusan anggaran daripada output agregat. PAD sebaiknya bertumpu pada pertumbuhan basis ekonomi, perbaikan administrasi, digitalisasi pemungutan, dan penggunaan penerimaan untuk layanan yang menurunkan biaya ekonomi masyarakat.

Pengaruh jumlah penduduk terhadap PDRB

Koefisien jumlah penduduk sebesar 4,682 dengan nilai probabilitas 0,046. Koefisien tersebut berarti bahwa peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 persen berkaitan dengan peningkatan PDRB atas dasar harga konstan sebesar sekitar 4,68 persen. Hasil ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara perubahan skala penduduk dan PDRB. Penduduk memperbesar penawaran tenaga kerja, konsumsi rumah tangga, jumlah pelaku usaha, dan basis pajak. Di wilayah yang memiliki infrastruktur dan kesempatan kerja memadai, peningkatan penduduk dapat memperluas pasar serta mendorong aglomerasi. Brulhart dan Sbergami (2009) menjelaskan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi dapat memberi manfaat pertumbuhan pada tahap tertentu melalui kedekatan pasar dan efisiensi jaringan.

Hubungan positif terhadap PDRB tidak selalu berarti kesejahteraan per kapita membaik. Pertumbuhan penduduk juga meningkatkan kebutuhan sekolah, fasilitas kesehatan, perumahan, air, sanitasi, transportasi, dan pengelolaan sampah. Apabila kapasitas layanan tertinggal, kepadatan dapat menimbulkan kemacetan, tekanan lingkungan, dan ketimpangan. Karena itu, pemerintah daerah perlu melihat indikator PDRB per kapita, produktivitas tenaga kerja, dan kualitas pelayanan publik.

Mobilitas antarkabupaten/kota merupakan isu penting di Bali. Perbedaan ini menyebabkan manfaat dan biaya pelayanan publik tersebar lintas batas administrasi. Koordinasi transportasi, perumahan, pasar kerja, dan layanan dasar.

Pengaruh periode COVID-19 terhadap PDRB

Dummy COVID-19 mempunyai koefisien -136,09 dengan probabilitas 0,576. Arah koefisien dengan dugaan bahwa pandemi menekan output, tetapi pengaruhnya tidak signifikan setelah belanja daerah, PAD, jumlah penduduk, dan efek tetap daerah dikendalikan. Hasil ini dapat terjadi karena sebagian dampak pandemi telah tercermin pada perubahan belanja dan PAD. Selain itu, satu dummy menyederhanakan guncangan yang berbeda antara 2020, 2021, dan 2022.

Ketergantungan pada pariwisata menyebabkan dampak pandemi di Bali sangat tidak merata. Daerah yang bertumpu pada akomodasi, makan-minum, transportasi, dan hiburan mengalami tekanan lebih kuat dibandingkan daerah dengan kontribusi pertanian atau kegiatan lokal yang lebih besar. Indrawati et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pascapandemi perlu menjaga pemulihan sekaligus kredibilitas fiskal. Sanjaya et al. (2024) menegaskan pentingnya transformasi menuju ekonomi Bali yang lebih produktif, hijau, terintegrasi, dan tidak bergantung pada satu sektor.

Implikasi kebijakan

Hasil penelitian mengarah pada tiga hal. Pertama, evaluasi fiskal perlu beralih dari sekadar besarnya anggaran menuju kualitas realisasi. Pemerintah daerah perlu menyiapkan proyek sejak awal tahun, mempercepat pengadaan yang berulang, dan memantau keluaran fisik serta manfaat layanan. Kedua, peningkatan PAD harus dilakukan tanpa menghambat kegiatan ekonomi. Ekstensifikasi berbasis data, integrasi sistem pembayaran, dan perbaikan pelayanan pajak lebih sesuai dibandingkan kenaikan beban yang tidak disertai manfaat publik. Ketiga, belanja perlu mengikuti struktur penduduk dan fungsi wilayah. Daerah pusat pekerjaan membutuhkan konektivitas dan layanan perkotaan, sedangkan wilayah produksi memerlukan infrastruktur yang menghubungkan komoditas lokal dengan pasar.

Koordinasi provinsi dan kabupaten/kota penting karena dampak belanja, pergerakan pekerja, rantai pasok, dan pariwisata melintasi batas administrasi. Literatur desentralisasi menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan sangat bergantung pada desain institusi dan pembagian kewenangan (Davoodi & Zou, 1998; Lin & Liu, 2000; Martinez-Vazquez & McNab, 2003; Rodriguez-Pose & Ezcurra, 2011; Zhang & Zou, 1998). Oleh sebab itu, agenda fiskal Bali perlu memadukan otonomi daerah dengan perencanaan kawasan dan standar pelayanan yang saling terhubung.

.KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja daerah, PAD, jumlah penduduk, dan periode COVID-19 terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali selama 2016-2024. Hasil regresi menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Jumlah penduduk juga mempunyai hubungan positif dan signifikan. PAD memiliki koefisien negatif tetapi tidak signifikan, sedangkan dummy COVID-19 bertanda negatif dan tidak signifikan. Temuan tersebut menegaskan bahwa besarnya penerimaan atau belanja saja belum cukup. Pemerintah daerah perlu memastikan anggaran dilaksanakan tepat waktu, diarahkan pada kegiatan produktif, dan disesuaikan dengan fungsi ekonomi serta kebutuhan penduduk setiap wilayah. Strategi peningkatan PAD sebaiknya memperluas basis ekonomi dan memperbaiki administrasi tanpa menambah beban usaha secara berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Ananta, B. M. E., & Erawati, N. M. A. (2025). The influence of PAD, DAU, and DBH on the allocation of capital expenditure in city districts in the Province of Bali in 2018-2021. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 5(1): 22-32. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v5i1.811>

- Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2): 177-200. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(89\)90047-0](https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0)
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2013). Output spillovers from fiscal policy. *American Economic Review*, 103(3): 141-146. <https://doi.org/10.1257/aer.103.3.141>
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2): S103-S125. <https://doi.org/10.1086/261726>
- Blanchard, O., & Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(4): 1329-1368. <https://doi.org/10.1162/003355302320935043>
- Bose, N., Haque, M. E., & Osborn, D. R. (2007). Public expenditure and economic growth: A disaggregated analysis for developing countries. *The Manchester School*, 75(5): 533-556. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2007.01028.x>
- Brollo, F., Nannicini, T., Perotti, R., & Tabellini, G. (2013). The political resource curse. *American Economic Review*, 103(5): 1759-1796. <https://doi.org/10.1257/aer.103.5.1759>
- Brulhart, M., & Sbergami, F. (2009). Agglomeration and growth: Cross-country evidence. *Journal of Urban Economics*, 65(1): 48-63. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2008.08.003>
- Davoodi, H., & Zou, H.-F. (1998). Fiscal decentralization and economic growth: A cross-country study. *Journal of Urban Economics*, 43(2): 244-257. <https://doi.org/10.1006/juec.1997.2042>
- Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H.-F. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. *Journal of Monetary Economics*, 37(2): 313-344. [https://doi.org/10.1016/S0304-3932\(96\)90039-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3932(96)90039-2)
- Easterly, W., & Rebelo, S. (1993). Fiscal policy and economic growth: An empirical investigation. *Journal of Monetary Economics*, 32(3): 417-458. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90025-B](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90025-B)
- Gadenne, L. (2017). Tax me, but spend wisely? Sources of public finance and government accountability. *American Economic Journal: Applied Economics*, 9(1): 274-314. <https://doi.org/10.1257/app.20150509>
- Ghosh, S., & Gregoriou, A. (2008). The composition of government spending and growth: Is current or capital spending better? *Oxford Economic Papers*, 60(3): 484-516. <https://doi.org/10.1093/oep/gpn005>
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurrohman. (2024). Indonesia's fiscal policy in the aftermath of the pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1): 1-33. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>
- Kneller, R., Bleaney, M. F., & Gemmell, N. (1999). Fiscal policy and growth: Evidence from OECD countries. *Journal of Public Economics*, 74(2): 171-190. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00022-5](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00022-5)
- Lewis, B. D. (2013). Local government capital spending in Indonesia: Impact of intergovernmental fiscal transfers. *Public Budgeting & Finance*, 33(1): 76-94. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2013.12002.x>

- Lin, J. Y., & Liu, Z. (2000). Fiscal decentralization and economic growth in China. *Economic Development and Cultural Change*, 49(1): 1-21. <https://doi.org/10.1086/452488>
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. *World Development*, 31(9): 1597-1616. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00109-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8)
- Rodriguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2011). Is fiscal decentralization harmful for economic growth? Evidence from OECD countries. *Journal of Economic Geography*, 11(4): 619-643. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbq025>
- Sanjaya, P. K. A., Mustika, M. D. S., Sudharma, I. W. A. P., & Sembiring, C. F. P. (2024). Bali tourism and economic transformation: Towards economic resilience after the COVID-19 pandemic. Conference paper. <https://www.scribd.com/document/894694281/08-Sanjaya-BEFIC3-64-75>
- Setyari, N. P. W., Kiswanto, D., Haan, M. A. R., Purwanti, P. A. P., Suasih, N. N. R., Anandari, I. G. A. A. A., Yasa, I. M. P., & Mahaendrayasa, M. S. A. (2026). Fiscal governance and dynamics of budget execution timeliness: A Bayesian belief network assessment of economic growth. *Journal of Governance and Regulation*, 15(2): 481-492. <https://doi.org/10.22495/jgrv15i2siart15>
- Yasa, I. M. P., & Mahaendrayasa, M. S. A. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di wilayah Indonesia bagian barat. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(12): 4445-4463. <https://doi.org/10.24843/EEP.2022.v11.i12.p15>
- Zhang, T., & Zou, H.-F. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of Public Economics*, 67(2): 221-240. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(97\)00057-1](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(97)00057-1)
- .